



INTISARI

Penetapan upah harus didasarkan pada pemenuhan kebutuhan hidup minimum tenaga kerja, upaya peningkatan kesejahteraan pekerja, pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif dan efisien, peningkatan etos kerja serta kelangsungan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan dasar pemerintah propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan Upah Minimum Propinsi (UMP) tahun 2003 sebesar Rp. 360.000,00 serta mengetahui apakah UMP DIY tahun 2003 sebesar Rp. 360.000,00 sudah dapat memenuhi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) bagi tenaga kerja di DIY atau belum.

Penelitian dilakukan pada perusahaan tekstil di DIY yang berlokasi di Kabupaten Bantul yang telah melaksanakan kebijakan UMP. Perusahaan yang terpilih menjadi sampel adalah PT Asatex dan PT Samitex Sewon Bantul dengan pekerja yang menjadi sampel penelitian berjumlah 120 orang karyawan lajang, duda atau janda yang tidak beranak dan tidak mempunyai penghasilan lain yang telah memiliki masa kerja 5 sampai 10 tahun.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UMP DIY tahun 2003 sebesar sebesar Rp. 360.000,00 ditetapkan berdasarkan perhitungan KHM yang telah disesuaikan dengan indeks harga konsumen, kemampuan perkembangan ekonomi perusahaan dan kelangsungan usaha, tingkat perkembangan perekonomian daerah/nasional dan kondisi pasar kerja DIY yang dilakukan oleh Komisi Penelitian dan Jaminan Sosial Dewan Ketenagakerjaan DIY. UMP DIY yang ditetapkan oleh Gubernur DIY melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur DIY Nomor 178 Tahun 2002 belum memenuhi KHM tenaga kerja karena UMP hanya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan, sandang, dan aneka kebutuhan lainnya meliputi kebutuhan transportasi, rekreasi, dan hubungan sosial. Sedangkan untuk kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan KHM yaitu papan/tempat tinggal dan kebutuhan obat/kesehatan belum tercukupi.

Kesimpulan penelitian ini adalah penetapan UMP DIY tahun 2003 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui SK Gubernur DIY Nomor 178 Tahun 2002 dan belum memenuhi KHM tenaga kerja.



ABSTRACT

Wage judgment must based on worker minimum basic needs, effort of worker presperous improvement, quality, productivity, and efficiency human resources development, work ethos improvement, work productivity and factory sustainability. This research purposes for knowing and explaining based used Yogyakarta government for judgment provincial minimum wage 2003 with wage 360.000 rupiah and also knowing did this provincial minimum wage can sufficient worker minimum basic needs.

This research implemented on textile factory in Yogyakarta province with subject textile factory in Bantul regency had implemented provincial minimum wage policy. Respondent in this research is 120 worker on PT Asatex and Samitex Sewon Bantul who have worked 5 until 10 years.

Result of this research showed that Yogyakarta provincial minimum wage judgment based on basic need minimum for life (KHM) component number with fit on consumer price indexes, ability and sustainability of factory, region or national economic growth and labour market condition in Yogyakarta. With judgment wage commission research and social insurance of Yogyakarta work council department. Yogyakarta provincial minimum wage 2003 still can not sufficient worker basic needs. Because Yogyakarta provincial minimum wage just used for sufficient foods, clothes and other needs such transportation, recreation, and social relationship but not enough sufficient for house and healthy needs like on basic need minimum for life (KHM) component.

This research conclusion that provincial minimum wage judgement 2003 based on SK Gubernur DIY No 178 Tahun 2003 and not sufficient for basic need minimum for life (KHM).

Key words : Provincial Minimum Wage, Basic Need Minimum for Life (KHM).

- 1) Ministry of Man Power and Transmigration, Bantul Regency.
- 2) Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.
- 3) Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.